

Pemetaan Batas Administrasi Desa Secara Kartometrik di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

The Delineation of Village Administration Boundaries using Cartometric Method In Sriwulan Village, Limbangan District, Kendal Regency

Nurhadi Bashit¹, Novia Sari Ristianti² dan Desyta Ulfiana³

¹ Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

² Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

³ Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Corresponding author : nurhadi.bashit@live.undip.ac.id

Abstrak

Desa Sriwulan merupakan salah satu desa di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Desa Sriwulan memiliki potensi pariwisata sehingga desa tersebut mengembangkan desa wisata. Potensi tersebut perlu didukung oleh informasi geospasial terkait batas wilayah, Ketersediaan data dan informasi spasial sangat dibutuhkan di desa tersebut. Oleh karena itu, tim pengabdian masyarakat membantu dalam pemetaan batas administrasi desa. Pemetaan batas administrasi desa menggunakan metode kartometrik dan partisipatif masyarakat. Kegiatan partisipatif masyarakat bertujuan untuk membantu proses deliniasi batas serta memenuhi kelengkapan data dan informasi spasial. Kegiatan ini menggunakan data citra satelit yang digunakan untuk peta kerja. Metode pelaksanaan dilakukan terlebih dahulu sosialisasi, yang dilanjutkan diskusi mengenai deliniasi batas administrasi desa hingga unit terkecil berupa batas RT. Hasil pemetaan dilakukan survei lapangan untuk memastikan keakuratan dari hasil deliniasi di peta kerja. Peta administrasi dapat digunakan untuk pengembangan potensi desa dan masyarakat mengetahui mengenai informasi geospasial.

Kata Kunci : Batas administrasi, Desa, Kartometrik, Partisipatif masyarakat.

Abstract

Sriwulan Village is one of the villages in Limbangan District, Kendal Regency, Central Java Province. Sriwulan Village has tourism potential so that the village develops a tourist village. This potential requires the support of geospatial information related to regional boundaries. Availability of spatial data and information is needed in the village. Therefore, the community service team assisted in mapping the village administrative boundaries. Mapping of village administrative boundaries uses a cartometric and community participatory method. Community participatory activities aim to assist the process of delineation of boundaries and to fulfill the completeness of spatial data and information. This activity uses satellite image data which is used for work maps. The implementation method is carried out first by socialization, followed by a discussion regarding the delineation of village administrative boundaries to the smallest unit in the form of RT boundaries. The results of the mapping are carried out by field surveys to ensure the accuracy of the delineation results on the work map. The results of the Sriwulan Village Administrative maps can be used for village potential development and the community knows about geospatial information.

Keywords : Administrative boundaries, Village, Cartometric, Community participation.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan setiap daerah dalam membuat undang-undang tentang pemerintah daerah. Implementasi otonomi daerah memberikan perhatian khusus pada batas administrasi antar wilayah. Otonomi daerah berdampak pada perkembangan suatu daerah dengan adanya pemekaran. Pemekaran daerah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun,

pemekaran daerah berdampak pada batas antar wilayah sehingga dapat menyebabkan sengketa antar wilayah yang menimbulkan konflik di daerah perbatasan. Batas daerah berfungsi untuk menciptakan tertib administrasi, kepastian hukum sehingga meminimalisasir terjadinya konflik batas, perhitungan fiskal daerah, identifikasi dan inventarisasi potensi daerah (Budisusanto et al., 2014). Namun, Pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penataan batas wilayah (Joyosumarto 2013). Pasca penerapan otonomi daerah, permasalahan yang sering muncul baik antar daerah otonom maupun dalam satu daerah otonom adalah permasalahan batas wilayah (Yuwono et al., 2019). Batas administrasi terkecil di Indonesia berupa batas RT sehingga informasi spasial lingkup RT dapat memberikan informasi lebih detail, akan tetapi kesediaan data spasial batas RT di Indonesia masih sangat terbatas (Wibowo dan Sudarmadji, 2010).

Permendagri No 1 Tahun 2017 memberikan kewenangan desa dalam penataan desa akan tetapi masih minim penerapan terkait penetapan batas wilayah secara spasial. Penentuan batas wilayah dapat dibagi menjadi dua tahapan yaitu tahapan penetapan dan tahapan penegasan. Penetapan batas wilayah dapat dilakukan secara kartometrik dilakukan pada peta dasar yang telah disepakati, sedangkan penegasan batas daerah merupakan proses penegasan batas daerah secara langsung dilapangan dengan pemasangan pilar-pilar batas (Sidik dan Basyid, 2021). Permendagri No 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah telah mengatur penarikan garis batas administrasi suatu wilayah dapat dilakukan dengan metode kartometrik. Penetapan batas menggunakan metode kartometrik memiliki keunggulan seperti tanpa harus melakukan survey langsung dilapangan karena penentuan batas wilayah berdasarkan perundingan diatas peta kerja sehingga waktu pelaksanaan lebih efisien. Oleh karena itu, tim pengabdian masyarakat melakukan pemetaan batas administrasi desa secara kartometrik di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Batas administrasi desa secara spasial diharapkan dapat membantu masyarakat dalam peningkatan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat.

METODE

Pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Desa Sriwulan berada antara 7°08'40" - 7° 09'40" Lintang Selatan dan 110°17'40" - 110°18'40" Bujur Timur. Desa Sriwulan memiliki luas sebesar 1,44 km². Desa Sriwulan memiliki jumlah penduduk 720 jiwa yang terdiri dari 355 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 365 jiwa berjenis kelamin perempuan. Mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani. Data pengabdian menggunakan data primer dan sekunder yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Pengabdian Masyarakat

No	Data	Tahun
1	Data Citra Worldview 2	2016
2	Partisipasi Masyarakat	2022
3	Peta Administrasi Kabupaten Kendal	-

Pengabdian masyarakat ini melakukan pemetaan batas administrasi desa secara kartometrik dan tanpa kesepakatan. Kartometrik menurut Kemendagri tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak, dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung. Sedangkan, Permendagri 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang menjadi alternatif dalam proses pelacakan atau penarikan garis batas daerah (kabupaten/kota dan provinsi) untuk mempercepat proses penegasan batas daerah. Metode kartometrik dilakukan pada proses penegasan batas desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien tanpa terjun ke lapangan. Sedangkan, penegasan batas desa tanpa kesepakatan merupakan kegiatan yang tidak menghasilkan kesepakatan dalam proses penarikan garis batasnya karena peraturan menyebutkan bahwa kewenangan batas desa berada di pemerintah daerah.

Kegiatan pengabdian dilakukan partisipatif masyarakat secara langsung dari kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam penegasan batas administrasi sampai batas terkecil RT sesuai dengan klaim dari masyarakat. Pemetaan partisipatif adalah publik bersama-sama atau terlibat dalam proses pengumpulan data dan analisis terkait masalah dan isu di sekitar mereka melalui identifikasi dan penggambaran fitur geospasial dengan menggunakan piranti dan teknologi pemetaan (Zarodi et al, 2016). Metode pemetaan partisipatif, dimana proses pengambilan data dan informasi di lapangan mengenai batas daerah tersebut melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan perangkat pemerintahan sebagai perencana dan pemberi informasi sekaligus sebagai pelaku pemetaan (Pande, 2014). Pemetaan partisipatif digunakan dalam penarikan batas desa/kelurahan karena memiliki karakteristik hampir sama dengan kegiatan lain, akan tetapi memiliki sedikit perbedaan dengan yang tercantum dalam (USAID, 2007). Hasil penegasan batas administrasi berupa data spasial yang diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam penyelesaian batas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan metode partisipatif masyarakat dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat. Kegiatan ini

dilakukan pada bulan Agustus Tahun 2022 yang berlokasi di Gedung Serba Guana Desa Sriwulan. Kegiatan pengabdian dimulai dengan sosialisasi mengenai pentingnya data spasial dan penegasan batas sampai unit terkecil batas RT seperti Gambar 1. Selanjutnya, kegiatan diskusi mengenai batas administrasi dilakukan menggunakan acuan peta kerja yang telah disediakan. Deliniasi batas administrasi desa dilakukan secara kartometrik dengan bantuan partisipatif masyarakat dan perangkat desa seperti Gambar 2. Partisipatif masyarakat dilakukan dengan berdiskusi mengenai batas administrasi sesuai pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat.



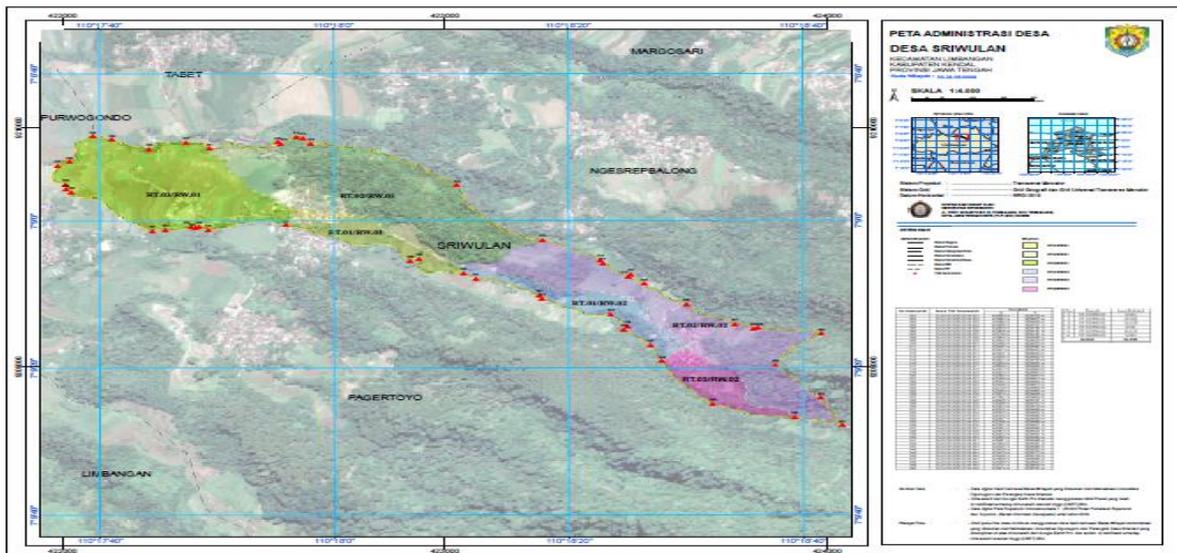
Gambar 1. Sosialisasi Penegasan Batas Administrasi



Gambar 2. Diskusi Deliniasi Batas Administrasi

Desa Sriwulan terbagi menjadi 2 RW dan 6 RT yang terpisahkan oleh jalan sehingga memudahkan dalam proses deliniasi. Data spasial deliniasi batas administrasi Desa Sriwulan dilakukan metode kartometri menggunakan bantuan

Software QuantumGIS dan pemetaan partisipatif. Deliniasi dilakukan pada peta kerja yang langsung didigitasi dikomputer dengan bantuan masyarakat dalam menentukan titik-titik batasnya. Bantuan perangkat desa dan masyarakat dalam melakukan deliniasi batas administrasi memberikan kemudahan dan mempercepat penyelesaian penegasan batas karena memiliki pengetahuan mengenai batas desa. Hasil penegasan batas administrasi Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Gambar 3. Tim pengabdian masyarakat dan perangkat desa melakukan survei lapangan untuk memastikan hasil deliniasi batas telah sesuai.



Gambar 3. Peta Administrasi Desa Sriwulan



Gambar 4. Survei Lapangan

KESIMPULAN

Deliniasi batas administrasi Desa Sriwulan menggunakan metode kartometrik dan pemetaan partisipatif masyarakat. Masyarakat desa sangat membantu dalam penentuan garis batas administrasi pada unit terkecil berupa RT. Pengabdian masyarakat memberikan pengetahuan kepada perangkat desa dan masyarakat mengenai pentingnya batas wilayah dan data spasial sehingga dapat digunakan untuk perkembangan desa dan peningkatan potensi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Budisusanto, Y., Khomsin, K., Purwanti, R., Nurry, A., dan Widiastuty, R. (2014). Pemetaan Partisipatif Batas Kelurahan Di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. *Geoid*, 10(1), 87. <https://doi.org/10.12962/j24423998.v10i1.701>
- Joyosumarto, S. (2013). Sengketa Batas Daerah pada Era Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Program Pascasarjana S3 Teknik Geomatika Fakultas Teknik UGM
- Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). 2012. Pedoman Penegasan Batas Daerah Nomor 76 Tahun 2012.
- Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). (2017). Peraturan Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Restu Pande. 2014. Penentuan Batas Wilayah dengan Metode Kartometrik (Studi Kasus: Kecamatan Gubeng dan Tambaksari). Teknik Geomatika. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.
- Sidik, H. M., dan Basyid, M. . (2021). Pembuatan Peta Batas Wilayah Administrasi RT / RW Sub Wilayah Arcamanik Kota Bandung. *Seminar Nasional Dan Diseminasi Tugas Akhir 2021*.
- USAID (United States Agency for International Development). (2007). Buku Panduan Pemetaan Partisipatif dengan Peta Kulihat Desaku. USAID Indonesia. Jakarta. 38hlm.
- Wibowo, A. dan Sudarmadji, B.W. 2010. Peta Skala Besar (Batas RW) dan Manfaatnya. Majalah Ilmiah Globe.
- Yuwono, Budisusanto, Y., dan Firdaus, Z. (2019). Analisa Kronologis Permasalahan



Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Donggala Dan Kabupaten Mamuju Utara Dengan Menggunakan Metode Kartometrik Dan Geospasial. *Geoid*, 15(1), 20–27. <https://doi.org/10.12962/j24423998.v15i1.3882>

Zarodi, H., Rusdiyatomoko, A., dan Widiyanto, F.A.S. (2016). Pemetaan partisipatif dalam rangka rencana kontonjensi banjir lahar hujan. *Prodising Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Mmehingai NKRI 2016*, 173-194. Badan Informasi Geospasial. <http://dx.doi.org/10.24895/SNG.2016.0-0.83>.